



RILIS

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023 – 2024
KE PROVINSI SUMATERA UTARA
TANGGAL 7 – 11 FEBRUARI 2024**

Komisi II DPR RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja reses ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Februari 2024 dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terkait persiapan dan kesiapan pemilu serentak tahun 2024. Kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI dipimpin oleh Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, M.T. Ketua Tim/Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar. Kunjungan kerja reses hari ini diikuti juga oleh beberapa Anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi, dan didampingi pula oleh pejabat dari Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra Komisi II DPR RI, yakni dari Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI.

Komisi II DPR RI dalam 2 tahun terakhir selalu melakukan kunjungan kerja dengan tema kepemiluan, apalagi saat ini tinggal 7 hari lagi menuju pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Kunjungan reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara ingin mencermati perkembangan tahapan pemilu serentak tahun 2024 se-Provinsi Sumatera Utara dengan mengambil sample salah satunya Kabupaten Karo. Hal-hal yang menjadi perhatian Komisi II DPR RI antara lain: pengamanan pemilu serentak 2024, pengadaan dan distribusi logistik, penanganan pelanggaran pemilu, pemutakhiran data pemilih, dan memastikan pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, dan lain-lain. Keserentakan pemilu tentu sangat rumit dan kompleks. Beban bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi oleh seluruh stakeholder untuk memastikan persiapan dan kesiapan pemilu ini agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara secara umum menyampaikan bahwa tidak ada hal-hal yang mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu serentak pada 14 Februari 2024 yang akan datang. Pendistribusian logistik telah mencapai 99.5% ke 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Paling lambat H-1 seluruh logistik pemilu telah sampai ke masing-masing TPS. KPU Provinsi Sumatera utara menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI yang telah memperjuangkan penambahan jumlah anggota KPPS yang dapat mengikuti bimbingan teknis (bimtek). Pada pemilu serentak tahun 2019 bimtek hanya untuk 2 anggota KPPS sedangkan pada pemilu serentak 2024 bimtek untuk seluruh anggota KPPS (7 orang). Terkait penanganan pelanggaran pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa tidak ada temuan atau laporan yang sampai pada tingkat Gakkumdu yang artinya tidak ada pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana pemilu.

Pemerintah Kabupaten Karo telah memberikan asuransi kesehatan bagi penyelenggara pemilu sebagaimana amanat Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Perlindungan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian bagi Penyelenggara Badan AdHoc Pemilu 2024. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo rutin melakukan kegiatan jemput bola untuk perekaman KTP-el di sekolah-sekolah bagi pemilih pemula. Terkait pengamanan pemilu serentak tahun 2024, Polda Sumatera Utara telah melakukan pemetaan kerawanan dan mengkalsifikasi menjadi 4 kategori berdasarkan resiko keamanannya (aman, kurang rawan, rawan, sangat rawan). Sebanyak 12.906 orang personel telah disiapkan untuk pengamanan kantor dan fasilitas KPU dan Bawaslu provinsi/kabupaten/kota serta di seluruh TPS di Provinsi Sumatera Utara.

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Forkopimda, KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atas kesiapannya dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Beberapa catatan yang disampaikan anggota Komisi II DPR RI pada kunjungan kerja reses ke Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU Provinsi Sumatera Utara memastikan proses distribusi logistik pemilu sampai ke seluruh TPS dan kerusakan atau kekurangan surat suara dapat terpenuhi paling lambat H-1 sebelum pemungutan suara.
2. Komisi II DPR RI mendorong KPU Provinsi Sumatera Utara meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan proses pemutakhiran data pemilih terutama DPTb dan DPK serta pemilih pemula yang pada hari H pemungutan suara berusia 17 tahun dapat menggunakan hak pilihnya tanpa terkendala administrasi.
3. Jaringan internet di Provinsi Sumatera Utara belum merata dan menjangkau seluruh daerah, oleh karena itu Komisi II DPR RI meminta KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan upaya antisipasi terhadap beberapa TPS yang berada di daerah blank spot.
4. Komisi II DPR RI mendorong KPU Provinsi Sumatera Utara meningkatkan sosialisasi pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang merupakan alat bantu transparansi pada pemilu serentak 2024, namun jika terjadi perbedaan angka dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi maka data yang dijadikan acuan adalah rekapitulasi manual.
5. Mendekati masa tenang pemilu yang tinggal 3 hari lagi, Komisi II DPR RI meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara meningkatkan koordinasi dengan Satpol PP dan stakeholder terkait lainnya dalam melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).
6. Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang tertib, aman, dan damai, Komisi II DPR RI mendukung Polda Sumatera Utara dan Forkopimda dalam melakukan upaya mitigasi untuk mengantisipasi titik-titik rawan pemilu.

Sumatera Utara, 11 Februari 2024,

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara.